Jurnal Pemimpin Bisnis Inovatif
Volume 4, Nomor 3, Juli 2026
e-ISSN: 3046-8841, p-ISSN: 3047-0226, Hal. 27-46
DOI: https://doi.org/10.61132/jpbi.v3i3.1383
Tersedia: https://ejournal.arimbi.or.id/index.php/JPBI

Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Dera Putri Amelya[1*], Vinola Herawaty[2]
[1-2] Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Indonesia
**Penulis Korespondensi: 023002102030@std.trisakti.ac.id*

Abstract. *.Carbon emission disclosure has become an important aspect of corporate sustainability reporting as stakeholders increasingly demand greater environmental transparency. This study aims to examine the influence of the board of commissioners, board of directors, institutional ownership, and audit committee on carbon emission disclosure in energy, industrial, and infrastructure companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 20212023 period. This research employed a quantitative approach using secondary data obtained from annual reports and sustainability reports. The sample was selected using purposive sampling, resulting in 366 firm-year observations. Data were analyzed using multiple linear regression with IBM SPSS. The results indicate that the board of commissioners and the board of directors do not have a significant effect on carbon emission disclosure. Institutional ownership has a positive and significant effect, indicating that institutional investors encourage greater environmental transparency. Meanwhile, the audit committee has a significant but negative effect, suggesting that its supervisory role remains primarily focused on financial reporting rather than environmental disclosure. Overall, the findings imply that corporate governance mechanisms have not fully enhanced carbon emission disclosure, except through the monitoring role of institutional ownership. This study contributes to the literature on corporate governance and environmental disclosure and provides practical implications for companies and investors in improving sustainability reporting practices.*

Keywords: *Audit Committee; Board of Commissioners; Carbon Emission Disclosure; Corporate Governance; Institutional Ownership.*

Abstrak. Pengungkapan emisi karbon menjadi salah satu bentuk transparansi perusahaan dalam memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan terhadap isu keberlanjutan dan perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor energi, industri, dan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 20212023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 366 observasi perusahaan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris dan dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Sebaliknya, kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, yang menunjukkan bahwa investor institusional mampu mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi lingkungan. Sementara itu, komite audit berpengaruh signifikan dengan arah negatif, yang mengindikasikan bahwa fungsi pengawasannya masih lebih berfokus pada aspek pelaporan keuangan dibandingkan pengungkapan lingkungan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan belum sepenuhnya mampu meningkatkan pengungkapan emisi karbon, kecuali melalui peran kepemilikan institusional. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan, investor, dan regulator dalam meningkatkan praktik pelaporan keberlanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Dewan Komisaris; Kepemilikan Institusional; Komite Audit; Pengungkapan Emisi Karbon; Tata Kelola Perusahaan.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan era modern dalam satu dekade terakhir mengalami percepatan yang signifikan di berbagai negara sebagai dampak dari globalisasi yang mendorong proses modernisasi di berbagai sektor kehidupan (Adrian, 2023). satu isu yang menjadi perhatian global adalah perubahan iklim yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca,

Received: 02 Mei 2026; Revised: 06 Juni 2026; Accepted: 05 Juli 2026; Terbit: 14 Juli 2026

termasuk emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas industri dan operasional perusahaan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, perusahaan tidak lagi hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pengungkapan emisi karbon dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan perusahaan.

Pengungkapan emisi karbon merupakan bentuk transparansi perusahaan kepada para pemangku kepentingan mengenai dampak lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas operasionalnya. Informasi tersebut menjadi penting karena dapat menunjukkan komitmen perusahaan terhadap upaya mitigasi perubahan iklim serta mencerminkan nilai dan tanggung jawab bisnis perusahaan. Berdasarkan teori stakeholder, pengelolaan lingkungan yang baik dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menciptakan keunggulan kompetitif, terutama karena konsumen semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dalam memilih produk dan jasa (Zahara, 2022).

Di Indonesia, praktik pengungkapan emisi karbon masih bersifat sukarela sehingga terdapat perbedaan yang cukup besar dalam tingkat dan kualitas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan (Putri & Dewi, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor tertentu yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam mengungkapkan informasi terkait emisi karbon. Salah satu faktor yang diduga memiliki pengaruh penting adalah tata kelola perusahaan (corporate governance).

Tata kelola perusahaan berfungsi sebagai sistem pengendalian dan pengawasan yang bertujuan memastikan bahwa perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dewan komisaris sebagai organ pengawas utama memiliki peran penting dalam mengarahkan manajemen agar memperhatikan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen mampu meningkatkan kualitas pengungkapan emisi karbon karena memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan perusahaan (Firmansyah & Yanto, 2022).

Selain dewan komisaris, dewan direksi juga berperan dalam menentukan arah kebijakan strategis perusahaan, termasuk kebijakan terkait pengelolaan dan pelaporan lingkungan. Dewan direksi yang memiliki ukuran lebih besar dan latar belakang yang beragam dinilai mampu memberikan perspektif yang lebih luas dalam mengidentifikasi risiko lingkungan dan merumuskan strategi keberlanjutan. Kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon secara lebih komprehensif dan transparan (Nurlaily& Sari,2020).

Dari sisi eksternal, kepemilikan institusional berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap perilaku manajemen. Investor institusional umumnya memiliki perhatian yang tinggi terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), sehingga mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi informasi yang berkaitan dengan keberlanjutan. Penelitian terdahulu menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan emisi karbon perusahaan (Haryanto & Prasetyo, 2021).

Selain itu, komite audit memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan integritas pelaporan perusahaan. Komite audit yang aktif dan kompeten mampu memastikan bahwa informasi lingkungan, termasuk emisi karbon, disajikan secara akurat dan memadai dalam laporan perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komite audit berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengungkapan informasi lingkungan (Amalya& Wibowo, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian ini juga menggunakan ukuran perusahaan dan tipe perusahaan sebagai variabel kontrol yang diperkirakan turut memengaruhi tingkat pengungkapan emisi karbon.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Stakeholder

Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas perusahaan, seperti investor, pelanggan, pemerintah, karyawan, dan masyarakat. Keberlangsungan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan perlu menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah pengungkapan emisi karbon yang dapat memberikan informasi mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan. Dengan pengungkapan yang memadai, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder serta memperkuat reputasi dan keberlanjutan usahanya (Ayamga et al., 2024; Kolk, 2020)

Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (agent) yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan. Dalam hubungan tersebut sering muncul konflik kepentingan karena manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemilik perusahaan. Kondisi ini dapat menimbulkan asimetri informasi yang berpotensi merugikan pemegang saham. Untuk mengurangi konflik tersebut, perusahaan memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Mekanisme tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, termasuk dalam penyampaian informasi lingkungan seperti pengungkapan emisi karbon.

Teori Legitimasi

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan berupaya memperoleh penerimaan dan dukungan dari masyarakat dengan menjalankan aktivitas yang sesuai dengan norma, nilai, dan harapan sosial yang berlaku. Perusahaan yang mampu memenuhi ekspektasi masyarakat akan memperoleh legitimasi yang dapat mendukung keberlangsungan usahanya. Sebaliknya, kegagalan perusahaan dalam memenuhi harapan masyarakat dapat menimbulkan risiko reputasi dan menurunkan kepercayaan publik. Dalam konteks lingkungan, pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu bentuk komunikasi perusahaan kepada masyarakat mengenai upaya yang dilakukan dalam mengelola dampak lingkungan sehingga dapat mempertahankan legitimasi perusahaan (Lopez et al, 2021)

Pengungkapan Emisi Karbon

Pengungkapan emisi karbon merupakan penyampaian informasi mengenai emisi gas rumah kaca yang dihasilkan perusahaan sebagai akibat dari aktivitas operasionalnya. Pengungkapan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap isu perubahan iklim serta menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan (Kolk, 2020). Menurut Choi et al. (2013) pengungkapan emisi karbon dapat diukur melalui beberapa aspek, yaitu perubahan iklim (climate change), emisi gas rumah kaca (greenhouse gas emissions), konsumsi energi (energy consumption), pengurangan emisi dan biaya (reduction and cost), serta akuntabilitas pengelolaan emisi karbon (accountability of emission carbon). Semakin luas informasi yang diungkapkan, semakin tinggi tingkat transparansi perusahaan dalam mengelola dampak lingkungannya. Dalam penenlititan ini CED diukur dengan jumlah point diungkapkan dibagi total poin pengungkapan (Kolk, 2020).

Tabel 1. Pengungkapan Emisi Karbon

Kategori	Kode	Indikator Pengungkapan
Perubahan Iklim: Risiko dan Peluang (Climate Change: Risks and Opportunities)	CC1	Penilaian atau deskripsi mengenai risiko yang berkaitan dengan perubahan iklim (risiko regulasi, fisik, maupun risiko lainnya) serta tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengelola risiko tersebut.
	CC2	Penilaian atau deskripsi mengenai dampak finansial saat ini maupun potensi peluang bisnis yang timbul akibat perubahan iklim.
Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca (Greenhouse Gas Emissions Accounting)	GHG1	Penjelasan mengenai metode yang digunakan perusahaan dalam menghitung emisi gas rumah kaca (GRK), misalnya menggunakan GHG Protocol atau standar ISO 14064.
	GHG2	Pengungkapan mengenai verifikasi emisi GRK oleh pihak independen beserta lembaga yang melakukan verifikasi.
	GHG3	Total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan perusahaan selama satu periode pelaporan.
	GHG4	Pengungkapan emisi berdasarkan kategori Scope 1, Scope 2, dan Scope 3.
	GHG5	Pengungkapan sumber emisi gas rumah kaca berdasarkan jenis energi atau aktivitas operasional perusahaan.
	GHG6	Pengungkapan emisi berdasarkan lokasi fasilitas atau unit operasional perusahaan.
	GHG7	Perbandingan jumlah emisi gas rumah kaca dengan periode pelaporan sebelumnya.
Perhitungan Konsumsi Energi (Energy Consumption Accounting)	EC1	Total konsumsi energi perusahaan selama satu periode pelaporan.
	EC2	Pengungkapan penggunaan energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
	EC3	Rincian konsumsi energi berdasarkan jenis energi, lokasi, atau unit operasional perusahaan.
Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Biaya (GHG Reduction and Cost)	RC1	Strategi atau program yang diterapkan perusahaan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
	RC2	Target pengurangan emisi gas rumah kaca beserta periode pencapaiannya.
	RC3	Informasi mengenai penghematan biaya atau manfaat ekonomi yang diperoleh dari program pengurangan emisi.
	RC4	Estimasi biaya yang dialokasikan perusahaan dalam pengelolaan atau pengurangan emisi karbon.
Akuntabilitas Emisi Karbon (Carbon Emission Accountability)	ACC1	Penjelasan mengenai tanggung jawab dewan direksi atau manajemen puncak terhadap pengelolaan isu perubahan iklim dan emisi karbon.
	ACC2	Penjelasan mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi pengelolaan emisi karbon oleh dewan komisaris, komite, atau pihak yang berwenang.

Berdasarkan lima kategori pengungkapan emisi karbon, terdapat 18 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan emisi karbon perusahaan. Setiap indikator yang diungkapkan dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan perusahaan diberikan skor 1, sedangkan indikator yang tidak diungkapkan diberikan skor 0. Selanjutnya, skor seluruh indikator dijumlahkan dan dibandingkan dengan jumlah indikator maksimum (18 indikator)

untuk memperoleh indeks pengungkapan emisi karbon perusahaan. Semakin tinggi nilai indeks yang diperoleh, semakin luas tingkat pengungkapan emisi karbon yang dilakukan oleh perusahaan. Pengukuran ini mengacu pada indeks Carbon Disclosure Project (CDP) yang dikembangkan oleh Choi et al. (2013) dan telah banyak digunakan dalam penelitian mengenai pengungkapan emisi karbon di Indonesia.

Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertanggung jawab memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan sesuai dengan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, serta prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, keberadaan dewan komisaris diharapkan mampu meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham (Agustin & Oktavianna, 2019). Dewan komisaris diukur menggunakan proporsi jumlah seluruh anggota dewan komisaris. (Coles et al. 2008)

Dewan Direksi

Dewan direksi adalah sekelompok individu yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mengawasi dan mengelola perusahaan. Dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan terkait keuangan, operasi, dan arah strategis perusahaan (Oyewo, 2023). Dewan direksi diukur menggunakan proporsi jumlah seluruh anggota dewan direksi (Abbas et al, 2024)

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham oleh suatu institusi dari keseluruhan total saham beredar. Persentase kepemilikan sahan yang tinggi akan menjadikan tingkat pengawasan dan tekanan yang dilakukan terhadap manajemen perusahaan juga akan tinggi (Salsabilla et al., 2024). Kepemilikan Institusioanal diukur menggunakan proporsi jumlah saham institusional dibagi jumlah saham yang beredar

Komite Audit

Komite audit memiliki kedudukan yang krusial dalam pengawasan sekaligus pengaturan sejumlah mekanisme yang melibatkan pelaporan finansial dan hal ini memberikan kepastian jika penyusunan laporan berbasis finansial sudah disesuaikan dengan ketentuan yang memang telah berlaku (Budiharta & Kacaribu, 2020). Sebagai badan pengawas perusahaan, komite audit bertanggung jawab untuk memantau aktivitas operasional dan memastikan akurasi serta transparansi laporan keuangan. Komite audit diukur menggunakan proporsi total anggota komite audit diluar perusahaan dibagi total anggota komite audit Qonita & Shinta (2024).

Ukuran Perusahaan (Variabel Kontrol)

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang mencerminkan kapasitas sumber daya, aset, dan aktivitas operasional yang dimiliki. Perusahaan yang berukuran besar umumnya memperoleh perhatian yang lebih besar dari investor, pemerintah, maupun masyarakat sehingga memiliki dorongan yang lebih kuat untuk mengungkapkan informasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk pengungkapan emisi karbon. Selain itu, perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih memadai dalam menyusun laporan keberlanjutan secara lebih komprehensif. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol untuk mengendalikan pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon. Ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural (Ln) dari total aset perusahaan sesuai dengan pengukuran yang umum digunakan dalam penelitian akuntansi dan keuangan.

Tipe Industri (Variabel Kontrol)

Tipe industri merupakan karakteristik perusahaan berdasarkan tingkat sensitivitas aktivitas operasionalnya terhadap lingkungan. Perusahaan yang bergerak pada industri dengan dampak lingkungan tinggi (high-profile industries), seperti sektor energi, pertambangan, manufaktur, dan infrastruktur, umumnya menghadapi tekanan yang lebih besar dari regulator, investor, dan masyarakat untuk mengungkapkan informasi mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, tipe industri digunakan sebagai variabel kontrol untuk mengendalikan perbedaan karakteristik antar industri yang dapat memengaruhi tingkat pengungkapan emisi karbon.

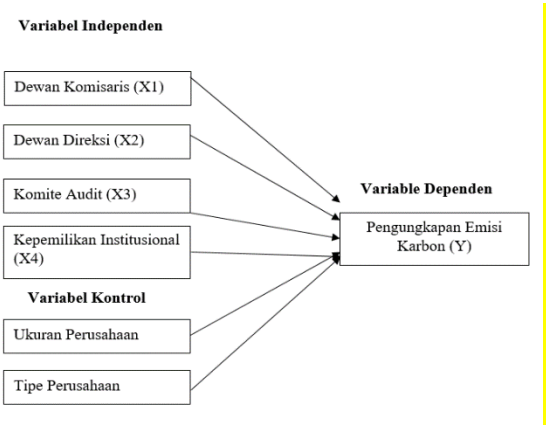
Dalam penelitian ini, tipe industri diukur menggunakan variabel , dengan kriteria sebagai berikut.

Tabel 2. Pengukuran Variabel Tipe Industri

Kategori Industri	Kode
Industri yang menghasilkan emisi karbon tinggi (*carbon-intensive industries*), seperti sektor energi, industri dasar, bahan baku, manufaktur, dan infrastruktur	**1**
Industri selain kategori tersebut (*non-carbon-intensive industries*)	**0**

Sumber: Diadaptasi dari Choi et al. (2013) dan penelitian terdahulu.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual.

Pengembangan Hipotesis

Dewan komisaris berperan penting dalam mengawasi jalannya operasional perusahaan serta memastikan bahwa kepentingan seluruh stakeholder dapat terakomodasi secara seimbang. Keberadaan dewan komisaris tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pihak yang dapat mempengaruhi arah kebijakan perusahaan, termasuk dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dewan komisaris menjadi krusial dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dalam konteks pengungkapan emisi karbon, peran dewan komisaris dapat memberikan tekanan atau dorongan kepada manajemen untuk lebih terbuka dan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan (Qonita & Shinta, 2024).

H1: Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon

Teori legitimasi menjelaskan bagaimana sebuah organisasi berupaya untuk mendapat pengakuan dari masyarakat dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Pihak yang bertanggung jawab mendapatkan legitimasi adalah manajemen perusahaan. Kurangnya pengaruh dewan direksi dalam melakukan pengungkapan emisi karbon dapat menyebabkan krisis legitimasi. Selain itu, ukuran dewan direksi yang besar juga dapat menyebabkan variasi suara dalam pengambilan keputusan yang menjadikan keputusan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon menjadi kecil (Adiandra et al., 2024). Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Adiandra et al. (2024); Suzana et al. (2023); Rifqi et al. (2022) bahwa dewan direksi secara positif berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan. Semakin kuat peran dewan direksi dalam mengarahkan kebijakan keberlanjutan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon demi mempertahankan legitimasi di mata publik.

H2: Dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon

Teori Stakeholder menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara perusahaan dan para pemangku kepentingan, yang mendorong perusahaan untuk bersikap terbuka dalam menjalankan seluruh aktivitas operasionalnya. Tingginya kepemilikan institusional dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap perusahaan, sehingga perusahaan terdorong untuk mengungkapkan seluruh kegiatan yang dilakukan guna membentuk citra positif di mata stakeholder. Pengungkapan informasi oleh perusahaan ini juga memberikan sinyal positif kepada investor institusional dalam mengambil keputusan investasi (Angelina & Jesica, 2023). Berdasarkan Ahmad & Hexana (2025); Angelina & Jesica (2023); Risa & Deni (2025) bahwa kepemilikan institusional secara positif berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan.

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon

Komite audit memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan dan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai badan pengawas, komite audit bertanggung jawab untuk memantau aktivitas operasional perusahaan serta memastikan transparansi dan akurasi laporan keuangan. Komite audit yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas perusahaan, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan perusahaan (Ahmad & Hexana, 2025). Berdasarkan Angelina & Jesica (2023); Rifqi et al. (2022); Ahmad & Hexana (2025) bahwa komite audit secara positif berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan.

H4: Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon

3. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini disusun untuk menjelaskan tahapan sistematis dalam pelaksanaan penelitian, mulai dari perancangan konsep, pengumpulan data, hingga analisis data untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal-komparatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui pengujian hipotesis statistik (Creswell,2018)

Tahapan awal penelitian dimulai dengan identifikasi masalah dan studi literatur untuk membangun kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap pengungkapan emisi karbon. Kerangka ini didasarkan pada teori tata kelola perusahaan (corporate governance) yang menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, khususnya terkait isu lingkungan (Jensen & Mecking,1976)

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (annual report) dan laporan keberlanjutan (sustainability report) perusahaan sektor energi, industri, dan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu untuk memastikan data yang digunakan relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Slanjutnya, data dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS. Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan model regresi memenuhi asumsi Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) [18].

$$\mathbf{CED} = \alpha + \beta_1\ \mathbf{BSIZE} + \beta_2\ \mathbf{BIND} + \beta_3\ \mathbf{INS} + \beta_4\ \mathbf{AC} + \beta_5\ \mathbf{SIZE} + \beta_6\ \mathbf{TYPE} + \varepsilon$$

Keterangan:

CED = Carbon Emission Disclosure

α = Konstanta

β = Koofesien Regresi

BSIZE = Dewan Komisaris (variabel independen)

BIND = Dewan Direksi (variabel independen)

INS = Kepemilikan Institusional (variabel independen)

AC = Komite Audit (variabel independen)

SIZE = Ukuran Perusahaan (variabel kontrol)

TYPE = Tipe Industri (variabel kontrol)

ε = error

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Seluruh tahapan dilakukan secara sistematis agar hasil penelitian valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Ghozali, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Deviation	N
CED	0.2575	0.15030	366
BOC	3.4262	1.63314	366
BOD	3.7213	1.64988	366
INS	1.4366	7.21776	366
KA	1.0664	4.45481	366
SIZE	20.9309	6.37228	366
TYPE	0.7186	0.45031	366

Notes: CED = Pengungkapan Emisi Karbon BRD = Dewan Komisaris, BIND = Dewan Direksi, INS = Kepemilikan Institusional, AK = Komite Audit, SIZE = Ukuran Perusahaan, TYPE = Tipe Industri

Berdasarkan Tabel 3, penelitian ini menggunakan 366 observasi (N = 366) untuk seluruh variabel. Variabel dependen Carbon Emission Disclosure (CED) memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,2575 dengan standar deviasi 0,15030, yang menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan emisi karbon perusahaan masih relatif rendah dengan tingkat variasi data yang cukup kecil. Variabel Board of Commissioners (BOC) memiliki rata-rata 3,4262 dan standar deviasi 1,63314, sedangkan Board of Directors (BOD) memiliki rata-rata 3,7213 dengan standar deviasi 1,64988, yang menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris dan dewan direksi pada perusahaan sampel relatif bervariasi.

Selanjutnya, variabel Institutional Ownership (INS) memiliki nilai rata-rata 1,4366 dengan standar deviasi 7,21776, sedangkan variabel Komite Audit (KA) memiliki rata-rata 1,0664 dengan standar deviasi 4,45481, yang mengindikasikan adanya penyebaran data yang cukup tinggi pada kedua variabel tersebut. Variabel Firm Size (SIZE) memiliki nilai rata-rata 20,9309 dengan standar deviasi 6,37228, yang menunjukkan adanya variasi ukuran perusahaan dalam sampel penelitian. Adapun variabel TYPE memiliki rata-rata 0,7186 dengan standar deviasi 0,45031, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel termasuk dalam kategori yang dikodekan dengan nilai 1, dengan tingkat variasi yang relatif rendah.

Berdasarkan statistik deskriptif, variabel tipe industri memiliki nilai rata-rata sebesar 0,7186, yang menunjukkan bahwa dari 366 observasi, terdapat sekitar 263 observasi (71,86%) yang termasuk dalam kategori carbon-intensive industries (kode 1), sedangkan 103 observasi (28,14%) termasuk dalam kategori non-carbon-intensive industries (kode 0). Komposisi

tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan sampel merupakan perusahaan yang beroperasi pada sektor dengan tingkat emisi karbon yang tinggi, seperti energi, industri dasar, bahan baku, manufaktur, dan infrastruktur. Perusahaan pada kelompok ini umumnya menghadapi tekanan yang lebih besar dari regulator, investor, dan masyarakat untuk meningkatkan transparansi lingkungan melalui pengungkapan emisi karbon. Sejalan dengan teori legitimasi, perusahaan pada industri yang memiliki dampak lingkungan tinggi cenderung mengungkapkan informasi emisi karbon secara lebih luas sebagai upaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial. Selain itu, teori stakeholder menjelaskan bahwa semakin besar dampak lingkungan yang ditimbulkan perusahaan, semakin tinggi pula tuntutan para pemangku kepentingan terhadap keterbukaan informasi lingkungan. Oleh karena itu, tipe industri terbukti menjadi variabel kontrol yang penting karena karakteristik sektor usaha memengaruhi tingkat pengungkapan emisi karbon perusahaan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji multikonearitas adalah untuk melihat korelasi atau hubungan antar masing – masing variabel bebasnya. Dasar pengambilan keputusan dalam uji 53 multikolinearitas adalah apabila nilai VIF (Variance Inflation Factor) lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. Berikut adalah hasil analisis dengan nilai VIF ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Indikator	Nilai
Metode Uji	One-Sample Kolmogorov-Smirnov
Jumlah Sampel (N)	366
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,000
Keterangan	Data tidak berdistribusi normal

Sumber: Diolah dengan SPSS

Berdasarkan Tabel 4, Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual tidak berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikonearitas adalah untuk melihat korelasi atau hubungan antar masing – masing variabel bebasnya. Dasar pengambilan keputusan dalam uji 53 multikolinearitas adalah apabila nilai VIF (Variance Inflation Factor) lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. Berikut adalah hasil analisis dengan nilai VIF ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Keterangan
Dewan Komisaris (BOC)	1,690	Tidak terjadi multikolinearitas
Dewan Direksi (BOD)	1,610	Tidak terjadi multikolinearitas
Kepemilikan Institusional (INS)	7,241	Tidak terjadi multikolinearitas
Komite Audit (KA)	7,222	Tidak terjadi multikolinearitas
Ukuran Perusahaan (SIZE)	1,162	Tidak terjadi multikolinearitas
Tipe Industri (TYPE)	1,077	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Diolah dengan SPSS

Berdasarkan Tabel 5, seluruh variabel independen memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10. Nilai VIF tertinggi terdapat pada variabel Kepemilikan Institusional (INS) sebesar 7,241 dan Komite Audit (KA) sebesar 7,222, sedangkan nilai VIF terendah terdapat pada variabel Tipe Industri (TYPE) sebesar 1,077. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas sehingga model regresi layak digunakan untuk pengujian lebih lanjut.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antar kesalahan penganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan periode sebelumnya. Pada penelitian ini uji autokerasli diuji dengan menggunakan uji Durbin Watson. Dasar pengambilan keputusan uji Durbin Watson adalah apabila DU < DW < 4-DU maka tidak terdapat autokorelasi. Berikut adalah hasil analisis uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Kriteria	Nilai
Durbin-Watson (DW)	0,594
dU	1,8306
4 – dU	2,1694
Keterangan	Terjadi gejala autokorelasi

Sumber: Diolah dengan SPSS

Berdasarkan Tabel 6, diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 0,594. Nilai tersebut lebih kecil daripada nilai dU sebesar 1,8306, sehingga tidak memenuhi kriteria dU < DW < 4 − dU. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi mengalami gejala autokorelasi, yang menunjukkan adanya korelasi antara residual pada satu observasi dengan residual pada observasi lainnya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan dalam menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam penelitian ini menggunakan uji heteroskedastisitas Breusch-Pagan dengan dasar pengambilan keputusan yaitu apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil analisis dengan uji heteroskedastisitas Breusch-Pagan.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Keterangan
Dewan Komisaris (BOC)	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dewan Direksi (BOD)	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kepemilikan Institusional (INS)	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Komite Audit (KA)	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Ukuran Perusahaan (SIZE)	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Tipe Industri (TYPE)	Terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Diolah dengan SPSS

Berdasarkan Tabel 7, variabel Dewan Komisaris (BOC), Dewan Direksi (BOD), Kepemilikan Institusional (INS), Komite Audit (KA), dan Ukuran Perusahaan (SIZE) memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Namun, variabel Tipe Industri (TYPE) memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga terjadi gejala heteroskedastisitas pada variabel tersebut.

Uji regresi linear berganda

Uji Hipotesis

Tujuan penelitiaan ini adalah menarik kesimpulan berdasarkan hipotesis yang telah disusun dalam bab sebelumnya. Hipotesis yang digunakan bisa diterima ataupun ditolak. Uji hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari uji koefisiensi determinasi, uji F, dan uji T.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Sig.	Keterangan
Dewan Komisaris (BOC)	0,747	Tidak berpengaruh
Dewan Direksi (BOD)	0,215	Tidak berpengaruh
Kepemilikan Institusional (INS)	0,030	Berpengaruh
Komite Audit (KA)	0,020	Berpengaruh
Ukuran Perusahaan (SIZE)	0,095	Tidak berpengaruh
Tipe Industri (TYPE)	0,003	Berpengaruh

Sumber: Diolah dengan SPSS

Berdasarkan Tabel 8, variabel Kepemilikan Institusional (INS), Komite Audit (KA), dan Tipe Industri (TYPE) memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga berpengaruh signifikan terhadap Carbon Emission Disclosure (CED). Sementara itu, variabel Dewan Komisaris (BOC), Dewan Direksi (BOD), dan Ukuran Perusahaan (SIZE) memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Carbon Emission Disclosure (CED).

Uji Koofisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk menilai kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen yaitu pengungkapan emisi karbon. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda sehingga nilai adjusted koefisien determinasi menjadi kriteria utama untuk menilai kekuatan model.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Keterangan	Nilai
R Square	0,040
Persentase Pengaruh	4%

Sumber: Diolah dengan SPSS

Berdasarkan Tabel 9, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,040 menunjukkan bahwa variabel Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Tipe Industri mampu menjelaskan variasi Carbon Emission Disclosure sebesar 4%, sedangkan sisanya sebesar 96% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Uji F

Uji F digunakan dalam model regresi berganda untuk mengetahui apakah sekumpulan variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dalam konteks penelitian ini, uji F bertujuan untuk menguji apakah dewan direksi, kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan dan industri secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan karbon.

Tabel 10. Hasil Uji F (Simultan)

Keterangan	Hasil
Signifikansi	< 0,05
Kesimpulan	Berpengaruh signifikan secara simultan

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2026.

Berdasarkan Tabel 10, nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang terdiri atas Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Tipe Industri secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Carbon Emission Disclosure (CED).

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Dewan komisaris memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya operasional perusahaan serta memastikan bahwa kepentingan para pemangku kepentingan dapat terpenuhi. Berdasarkan teori stakeholder, dewan komisaris berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang mampu mendorong manajemen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, termasuk dalam pengungkapan informasi lingkungan seperti emisi karbon. Dengan adanya pengawasan yang efektif, perusahaan diharapkan lebih bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, dengan nilai signifikansi sebesar 0,747 (>0,05). Dengan demikian, Hipotesis 1 (H1) ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan atau jumlah dewan komisaris belum mampu mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan emisi karbon. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan dewan komisaris masih lebih berorientasi pada aspek kinerja keuangan dan kepatuhan perusahaan dibandingkan pada pelaporan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, keputusan mengenai pengungkapan emisi karbon kemungkinan lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan manajemen atau tuntutan regulator daripada oleh dewan komisaris. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Qonita dan Shinta (2024) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Pengaruh Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan akan berupaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat melalui berbagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam konteks tersebut, dewan direksi memiliki peran strategis dalam menetapkan kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan terkait keberlanjutan dan

pengungkapan emisi karbon. Semakin efektif peran dewan direksi, diharapkan semakin tinggi pula komitmen perusahaan dalam mengungkapkan informasi lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, dengan nilai signifikansi sebesar 0,215 (>0,05). Oleh karena itu, Hipotesis 2 (H2) ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa jumlah anggota dewan direksi belum menjadi faktor yang menentukan luas pengungkapan emisi karbon perusahaan. Dewan direksi kemungkinan masih lebih memprioritaskan pencapaian target operasional dan kinerja keuangan dibandingkan penyusunan strategi pelaporan lingkungan. Selain itu, pengungkapan emisi karbon masih bersifat sukarela bagi sebagian besar perusahaan sehingga belum menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan direksi. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Adiandra et al. (2024), Suzana et al. (2023), dan Rifqi et al. (2022) yang menemukan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk investor institusional. Kepemilikan institusional yang tinggi umumnya meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan terhadap manajemen sehingga mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam menyampaikan informasi, termasuk informasi mengenai emisi karbon. Investor institusional juga cenderung mempertimbangkan aspek lingkungan sebagai bagian dari pengambilan keputusan investasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, dengan nilai signifikansi sebesar 0,030 (<0,05). Dengan demikian, Hipotesis 3 (H3) diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin tinggi tingkat pengungkapan emisi karbon perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa investor institusional mampu memberikan tekanan kepada manajemen untuk meningkatkan transparansi informasi lingkungan sebagai bentuk akuntabilitas kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ahmad dan Hexana (2025), Angelina dan Jesica (2023), serta Risa dan Deni (2025) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Komite audit merupakan salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang bertugas membantu dewan komisaris dalam mengawasi proses pelaporan perusahaan serta memastikan bahwa informasi yang disajikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan teori agensi, keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan perusahaan, termasuk pelaporan mengenai tanggung jawab lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon dengan nilai signifikansi sebesar 0,020 (<0,05). Akan tetapi, nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah -0,011, sehingga arah pengaruhnya negatif. Dengan demikian, Hipotesis 4 (H4) ditolak, karena meskipun terdapat pengaruh yang signifikan, arah hubungan yang diperoleh tidak sesuai dengan hipotesis yang mengharapkan pengaruh positif. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah komite audit justru diikuti oleh penurunan tingkat pengungkapan emisi karbon. Kondisi tersebut dapat terjadi karena komite audit masih lebih memfokuskan pengawasannya pada kualitas laporan keuangan, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi dibandingkan pada pengungkapan informasi lingkungan yang bersifat sukarela. Dengan demikian, peningkatan jumlah komite audit belum tentu meningkatkan transparansi pengungkapan emisi karbon apabila isu keberlanjutan belum menjadi prioritas utama dalam fungsi pengawasannya. Temuan ini berbeda dengan penelitian Angelina dan Jesica (2023), Rifqi et al. (2022), serta Ahmad dan Hexana (2025) yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 (<0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik industri merupakan salah satu faktor yang memengaruhi luas pengungkapan emisi karbon perusahaan. Berdasarkan statistik deskriptif, variabel tipe industri memiliki nilai rata-rata sebesar 0,7186, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar sampel penelitian berasal dari kelompok carbon-intensive industries, yaitu perusahaan pada sektor energi, industri dasar, bahan baku, manufaktur, dan infrastruktur.

Perusahaan yang termasuk dalam industri dengan intensitas emisi karbon tinggi menghadapi tekanan yang lebih besar dari regulator, investor, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan. Sejalan dengan teori legitimasi, perusahaan pada industri yang memiliki dampak lingkungan tinggi cenderung melakukan pengungkapan emisi karbon yang lebih luas sebagai upaya memperoleh

dan mempertahankan legitimasi sosial. Selain itu, berdasarkan teori stakeholder, perusahaan pada sektor yang menghasilkan emisi tinggi memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas operasionalnya. Oleh karena itu, perusahaan pada kategori carbon-intensive industries umumnya memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam menyusun laporan keberlanjutan serta mengungkapkan informasi mengenai emisi karbon dibandingkan perusahaan pada sektor non-carbon-intensive. Hasil ini sekaligus memperkuat penggunaan tipe industri sebagai variabel kontrol, karena karakteristik industri terbukti turut memengaruhi tingkat pengungkapan emisi karbon sehingga perlu dikendalikan dalam model penelitian agar pengaruh variabel utama dapat diestimasi secara lebih akurat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor energi, industri, dan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris dan dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Sebaliknya, kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan, yang menunjukkan bahwa investor institusional mampu mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi emisi karbon. Sementara itu, komite audit berpengaruh signifikan dengan arah negatif, sehingga tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan pengungkapan emisi karbon, kecuali melalui peran pengawasan investor institusional. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu hanya menggunakan empat variabel independen dan sampel yang terbatas pada tiga sektor industri sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain, seperti profitabilitas, leverage, atau kinerja lingkungan, memperluas cakupan sektor penelitian, serta menggunakan metode analisis data panel agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan emisi karbon secara lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

Adrian, M. A. (2023). Analisis pengaruh aktivitas ekonomi terhadap peningkatan emisi karbon: Studi empiris empat negara ASEAN. Jurnal Ekonomi Indonesia, 12(2), 187–202.

Amalia, R., & Wibowo, A. (2023). Audit committee characteristics and carbon emission disclosure in Indonesia. Asian Journal of Sustainability Accounting, 5(1), 45–59.

Ayamga, T. A., Avortri, C., Donnir, S., & Tornyeva, K. (2024). Mediating effect of corporate governance on corporate social responsibility, market power and financial performance nexus. American Journal of Industrial and Business Management, 14, 1109–1145.

Choi, B. B., Lee, D., & Psaros, J. (2013). An analysis of Australian company carbon emission disclosures. Pacific Accounting Review, 25(1), 58–79.

Creswell, J. W. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). Sage.

Firmansyah, D., & Yanto, H. (2022). The role of board independence in carbon disclosure practices. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 19(2), 123–135.

Ghozali, I. (2021). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic econometrics (5th ed.). McGraw-Hill.

Haryanto, A., & Prasetyo, A. (2021). Institutional ownership and environmental disclosure: Evidence from Indonesia listed firms. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 13(3), 214–225.

Hassan, M. K., et al. (2021). Corporate governance and environmental disclosure: Evidence from emerging markets. Journal of Cleaner Production, 278.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.

Khomsiyah, K., Gunawan, J., & Nilawati, Y. J. (2023). Green accounting, environmental accounting, and sustainability: A current and future opportunity. Accounting and Financial Review, 6(2), 202–211. https://doi.org/10.26905/afr.v6i2.10554

Kolk, A. (2020). Sustainability, accountability, and corporate governance: The role of institutional investors. Business Strategy and the Environment, 29(1), 1–12.

López, M. V., et al. (2021). Corporate governance and environmental performance: Evidence from Spain. Sustainability, 13(2), 123–145.

Nurlaily, N., & Sari, M. E. (2020). Board diversity and environmental disclosure: Empirical evidence from Indonesia. International Journal of Business, Economic and Law, 22(4), 17–25.

Putri, M. D., & Dewi, K. C. (2021). Voluntary carbon emission disclosure and its determinants: Indonesian context. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 12(2), 290–308.

Zahara, N. (2022). Pengungkapan emisi karbon sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap perubahan iklim.